BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang

SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) adalah sebuah sistem yang mengintegrasikan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses administrasi pemerintahan serta untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. SPBE hadir sebagai bagian dari upaya untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik dan meningkatkan efektivitas pemerintahan. Di era digital ini, pemerintah memerlukan sistem yang lebih cepat, transparan, dan terintegrasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan pelayanan masyarakat. SPBE memungkinkan untuk terjalinnya komunikasi serta interaksi terhadap antar pemerintah satu sama lain seperti pemerintah daerah dengan pemerintahan pusat.

Implementasi SPBE pada pemerintahan di Kabupaten Way Kanan diperdalam dengan diterbitkannya peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). SPBE yang sedang berjalan diperlukan evaluasi berkala untuk mengetahui tingkatan kemampuan dari SPBE pada Kabupaten Way Kanan. Menurut evaluasi dan peninjauan yang dilansir oleh situs www.spbe.go.id yang sudah mengimplementasikan SPBE, terdiri dari Kementerian, Lembaga Pemerintahan Non Kementerian, Lembaga Lainnya, Lembaga Non Struktural dan Pemerintah Kota/Kabupaten. Kabupaten Way Kanan menggunakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Sesuai peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), bahwa diselenggarakannya SPBE untuk memanfaatkan teknologi informasi dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Infrastruktur SPBE terdiri dari perangkat lunak, perangkat keras serta fasilitas sebagai penunjang system. optimalisasi Infrastruktur TIK menjadi kendala sehingga menghasilkan nilai Indeks Pembangunan SPBE yang rendah

Beberapa alasan penting di balik hadirnya SPBE antara lain:

1. **Efisiensi Proses Administrasi**

SPBE memungkinkan otomatisasi proses administratif, mengurangi penggunaan kertas, serta mempercepat proses pengambilan keputusan.

2. **Transparansi dan Akuntabilitas**

   Dengan menggunakan sistem berbasis elektronik, setiap transaksi dan proses pemerintahan dapat lebih mudah dipantau dan diawasi oleh publik, yang berpotensi mengurangi praktik korupsi.

3. **Peningkatan Pelayanan Publik**

   SPBE memungkinkan pemerintah memberikan layanan yang lebih cepat, lebih tepat, dan lebih mudah diakses oleh masyarakat.

4. **Kemudahan Akses Informasi**

   Mempermudah masyarakat untuk memperoleh informasi tentang kebijakan pemerintah, proses administrasi, dan layanan yang tersedia.

Meskipun SPBE memiliki potensi besar dalam meningkatkan kualitas pemerintahan, penerapannya di kabupaten Way Kanan masih menghadapi beberapa tantangan, di antaranya:

1. Infrastruktur Teknologi yang Terbatas
2. Sumber Daya Manusia (SDM) yang Terbatas
3. Anggaran yang Tidak Cukup.
4. Ketergantungan pada Sistem yang Ada.
5. Keterbatasan Regulasi dan Koordinasi.

Latar belakang ini menggambarkan pentingnya mengukur Maturity Level dari SPBE untuk meningkatkan kualitas implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik di perangkat daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota pada Kabupaten Way Kanan. Penggunaan Capability Maturity Model Integration (CMMI) sebagai framework atau metode untuk menilai dan meningkatkan proses yang ada dapat menjadi langkah strategis dalam mencapai pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

CMMI (Capability Maturity Model Integration) merupakan sebuah kerangka kerja yang digunakan untuk meningkatkan proses organisasi, yang juga dapat diterapkan untuk menilai dan meningkatkan penerapan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) [27]. Dengan menggunakan CMMI, kita dapat mengidentifikasi masalah-masalah yang ada dalam penerapan

SPBE serta merancang langkah-langkah perbaikan berdasarkan tingkat kematangan proses yang ada di tiap OPD/ SKPD di Kabupaten Way Kanan.

Berikut adalah **latar belakang masalah** terkait dengan **Maturity Level (SPBE)** Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Way Kanan.

1. Pemerintahan berbasis elektronik atau **SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)** menjadi salah satu langkah penting dalam modernisasi administrasi pemerintahan, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas layanan public Khususnya di Kabupaten Way Kanan.
2. **Tantangan Implementasi SPBE di Daerah** yakni Beberapa perangkat daerah masih belum memiliki kapasitas dan infrastruktur yang memadai untuk melaksanakan SPBE secara optimal. Serta kemampuan sumber daya manusia, manajemen perubahan, serta kesadaran akan pentingnya SPBE juga menjadi faktor penentu kesuksesan.
3. **Pentingnya Maturity Level dalam Pengembangan SPBE** Untuk memastikan bahwa implementasi SPBE di perangkat daerah dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Menilai kematangan sistem ini menjadi sangat penting karena tanpa adanya evaluasi yang tepat, program SPBE mungkin tidak berjalan efektif dan efisien.[1]

CMMI menyediakan kerangka yang dapat digunakan untuk meningkatkan kematangan proses dalam pengembangan dan implementasi **SPBE**. CMMI membantu dalam meningkatkan pengelolaan kualitas, manajemen proyek, serta perbaikan berkelanjutan, yang semuanya sangat penting untuk keberhasilan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang efisien, efektif, dan berkelanjutan. Dengan menerapkan CMMI, perangkat daerah di Kabupaten Way Kanan atau wilayah lainnya dapat memastikan bahwa SPBE yang diterapkan memiliki kualitas tinggi, efisien, dan mampu memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Proses ini membantu pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan mengoptimalkan pengelolaan informasi melalui teknologi yang ada.[2]

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat kematangan **(Maturity Level)** sistem SPBE pada perangkat daerah Pemerintah Kabupaten dengan menggunakan **CMMI** sebagai alat ukur, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi terkait perbaikan yang diperlukan untuk mencapai implementasi SPBE yang lebih efektif dan efisien di tingkat daerah.[3]

Identifikasi Masalah

Terkait dengan Latar Belakang pada penelitian ini Kabupaten Way Kanan memiliki tantaangan yang teridentifikasi yaitu:

1. Infrastruktur Teknologi yang Terbatas

   Di Kabupaten Way Kanan Memiliki keterbatasan dalam infrastruktur TIK. Akses internet yang buruk dan perangkat keras yang usang menjadi hambatan signifikan dalam implementasi SPBE.

2. Sumber Daya Manusia (SDM) yang Terbatas

   Kurangnya tenaga ahli di bidang teknologi informasi di Kabupaten Way Kanan membuat penerapan SPBE sulit dilakukan dengan optimal. SDM yang belum cukup terlatih dalam penggunaan dan pengelolaan sistem elektronik juga menjadi hambatan.

3. Anggaran yang Tidak Cukup.

   Pengadaan sistem elektronik dan pengembangan infrastruktur TIK di Kabupaten Way Kanan membutuhkan Anggraran yang ukup besar.

4. Ketergantungan pada Sistem yang Ada.

   Di Pemerintahan Kabupaten Way Kanan sudah memiliki sistem administrasi yang berjalan dengan baik meskipun menggunakan cara konvensional. Beralih ke sistem elektronik membutuhkan waktu, perencanaan yang matang, serta pemeliharaan sistem yang tidak sedikit.

5. Keterbatasan Regulasi dan Koordinasi

   Kebijakan pemerintah pusat belum sepenuhnya disosialisasikan atau dipahami dengan baik di tingkat Pemerintah Kabupaten Way Kanan. Tanpa adanya regulasi yang jelas dan koordinasi yang baik antar pemerintah pusat, daerah, dan penyedia teknologi, penerapan SPBE menjadi terhambat.

Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah pada Maturity Level (SPBE) Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan bertujuan untuk menyempitkan fokus analisis agar lebih terarah, relevan, dan dapat memberikan solusi yang tepat. Berikut adalah beberapa pembatasan masalah digunakan dalam Penelitian ini :

1. Fokus pada Pengembangan dan Implementasi SPBE di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

2. Menerapkan Framework CMMI pada Level 2 dan Level 3
3. Analisis pada Faktor SDM dan Proses Pengelolaan SPBE
4. Penggunaan Infrastruktur dan Teknologi yang Tersedia di Pemerintah Daerah
5. Evaluasi Penggunaan Metrik dan Pengukuran Kinerja
6. Fokus pada Dampak SPBE terhadap Pelayanan Publik
7. Batasan pada Implementasi SPBE Sebagai Proses Transformatif, Bukan Proyek Sementara.

Perumusan Masalah

Perumusan Masalah mengarah pada analisis yang mendalam tentang tingkat kematangan SPBE yang dicapai oleh perangkat daerah di tingkat kabupaten/kota, Khususnya Kabupaten Way Kanan, faktor-faktor yang mempengaruhi, tantangan yang dihadapi, serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan implementasi SPBE. Fokusnya adalah pada masalah yang spesifik pada proses pengelolaan, teknologi, SDM, serta pengukuran kinerja untuk menghasilkan sistem pemerintahan yang lebih efisien dan responsif. Berikut adalah perumusan masalah yang terkait penelitian ini:

1. Bagaimana tingkat kematangan SPBE pada perangkat daerah di Pemerintah Kabupaten Way Kanan?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi tingkat kematangan SPBE di perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Way Kanan?
3. Bagaimana peran dan tantangan yang dihadapi oleh sumber daya manusia (SDM) dalam penerapan SPBE di perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Way Kanan?
4. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh perangkat daerah dalam mengelola dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi untuk mendukung SPBE?
5. Bagaimana proses pengelolaan dan standarisasi dalam penerapan SPBE pada perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Way Kanan?
6. Bagaimana pengukuran kinerja dan penggunaan metrik dalam mengevaluasi keberhasilan implementasi SPBE di perangkat daerah Kabupaten Way Kanan?
7. Apa dampak penerapan SPBE terhadap pelayanan publik di tingkat pemerintah Kabupaten Way Kanan?
8. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kematangan SPBE pada perangkat daerah pemerintah Kabupaten Way Kanan?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini berfokus pada penilaian tingkat kematangan SPBE di perangkat daerah kabupaten/kota dengan menggunakan framework CMMI (Capability Maturity Model Integration), identifikasi faktor penghambat dan pendorong implementasi, serta penilaian dampak SPBE terhadap kualitas pelayanan publik. Penelitian ini juga bertujuan untuk merumuskan strategi untuk meningkatkan kematangan SPBE, memperbaiki pengelolaan SDM dan teknologi, serta mengoptimalkan proses dan pengukuran kinerja dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Tujuan Penelitian dalam Maturity Level atau Tingkat Kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada perangkat daerah Pemerintah Kabupaten/Kota menggunakan framework CMMI (Capability Maturity Model Integration) adalah untuk menganalisis, mengevaluasi, dan memberikan rekomendasi dalam penerapan SPBE di tingkat daerah berdasarkan tingkat kematangan yang tercapai. [7]

1.5.1. Berikut adalah tujuan pada penelitian ini:

1. Menilai Tingkat Kematangan Implementasi SPBE di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menggunakan Framework CMMI yang bertujuan untuk mengukur sejauh mana perangkat daerah pemerintah kabupaten/kota telah menerapkan SPBE dengan memanfaatkan CMMI sebagai alat untuk menilai dan menentukan tingkat kematangan (maturity level) dalam pengelolaan sistem pemerintahan berbasis teknologi informasi.
2. Mengidentifikasi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kematangan SPBE di Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kematangan implementasi SPBE pada perangkat daerah, baik faktor internal (seperti SDM, anggaran, proses manajerial) maupun eksternal (seperti kebijakan dan regulasi).
3. Menganalisis Tantangan yang Dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam Mengelola dan Mengoptimalkan SPBE untuk menggali tantangan yang dihadapi oleh perangkat daerah dalam menerapkan SPBE, khususnya terkait dengan pengelolaan sumber daya manusia (SDM), infrastruktur teknologi, kebijakan, dan standarisasi proses.

4. Menilai Dampak Implementasi SPBE terhadap Efisiensi dan Kualitas Pelayanan Publik di Pemerintah Daerah untuk mengevaluasi sejauh mana implementasi SPBE berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi operasional, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik di perangkat daerah.
5. Menyusun Strategi Peningkatan Kematangan SPBE di Pemerintah Daerah Berdasarkan CMMI bertujuan untuk merumuskan langkah-langkah strategis yang dapat diterapkan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan kematangan SPBE, dengan fokus pada peningkatan kompetensi SDM, infrastruktur teknologi, proses pengelolaan, serta evaluasi kinerja menggunakan metrik yang sesuai.
6. Mengukur Konsistensi dan Standarisasi Proses dalam Implementasi SPBE di Pemerintah Daerah menilai apakah proses pengelolaan SPBE di perangkat daerah sudah terstandarisasi dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip CMMI, serta mengidentifikasi ketidakkonsistenan yang menghambat implementasi SPBE secara optimal.
7. Mengevaluasi Kesesuaian Penggunaan Metrik dan Pengukuran Kinerja dalam SPBE di Pemerintah Daerah mengevaluasi sejauh mana pengukuran kinerja dan metrik yang digunakan dalam implementasi SPBE sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam framework CMMI, serta untuk memberikan rekomendasi terkait sistem pengukuran yang lebih efektif.
8. Menganalisis Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Menghadapi Perubahan Teknologi untuk Mendukung SPBE untuk mengidentifikasi kesiapan perangkat daerah dalam menghadapi perubahan teknologi yang terus berkembang, serta untuk memberikan rekomendasi dalam mengelola perubahan tersebut agar dapat mendukung penerapan SPBE yang lebih baik di masa depan.[7]

Kegunaan Penelitian

Penelitian pada Maturity Level pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di perangkat daerah Pemda Kabupaten/Kota khususnya Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung menggunakan Framework CMMI (Capability Maturity Model Integration) memiliki beberapa kegunaan yang signifikan, antara lain:[3]

1.5.2. Evaluasi Kematangan Sistem SPBE

Penelitian ini berguna untuk mengukur sejauh mana perangkat daerah telah mengimplementasikan SPBE dalam proses pemerintahan mereka. Dengan menggunakan framework CMMI, penelitian ini dapat menilai tingkat kematangan sistem berdasarkan lima level yang ada, mulai dari level awal hingga level optimal. Ini memberikan gambaran jelas mengenai kesiapan teknologi informasi dalam mendukung pelayanan publik pada Pemda Kabupaten Way Kanan.

1.5.3. Identifikasi Kekuatan dan Kelemahan

Dengan penilaian kematangan sistem, penelitian ini dapat membantu mengidentifikasi area yang sudah berjalan dengan baik dan area yang memerlukan perbaikan atau peningkatan. Hal ini sangat penting untuk perencanaan strategis dan pengembangan lebih lanjut dari SPBE di Kabupaten Way Kanan.

1.5.4. Panduan Perbaikan Berkelanjutan

Framework CMMI memberikan pendekatan yang berkelanjutan dan terstruktur untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi sistem. Penelitian ini bisa digunakan sebagai dasar untuk merencanakan langkah-langkah perbaikan yang sistematis untuk mencapai tingkat kematangan yang lebih tinggi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Way Kanan.

1.5.5. Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintahan

Dengan adanya SPBE yang matang, transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan daerah dapat ditingkatkan. Penelitian ini juga dapat mengevaluasi apakah penggunaan teknologi informasi sudah memenuhi standar transparansi dan akuntabilitas yang diharapkan.

1.5.6. Penyusunan Kebijakan dan Strategi Pengembangan

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi pemerintah daerah khususnya Pemkab Way Kanan dalam menyusun kebijakan terkait pengembangan SPBE. Dengan mengetahui tingkat kematangan sistem, Pemda dapat merencanakan langkah-langkah untuk mengembangkan teknologi informasi yang lebih baik dalam jangka panjang.

1.5.7. Pembelajaran dan Referensi untuk Daerah Lain

Penelitian ini tidak hanya berguna bagi Pemda yang menjadi objek penelitian, tetapi juga dapat menjadi referensi bagi Pemda lain yang ingin melakukan evaluasi serupa. Proses dan

temuan penelitian dapat menjadi pembelajaran untuk meningkatkan SPBE di tingkat kabupaten atau kota lain.[3]